

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SAGULUNG)

Ade Warni Rahmadani Siregar¹, Karol Teovani Lodan²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putra Batam

²Dosen Pembimbing Studi Administrasi Negara, Universitas Putra Batam
email:pb151010057@upbatam.ac.id

ABSTRACT

According to DNO's observations in the field, when verifying data at the Special Social Service Office in the Sagulung District Area, there were very many who were not on target. This research was conducted to analyze the Implementation of a Poverty Reduction Program in which one of the poverty reduction programs in Batam City Especially in the District of Sagulung is the Hope Family Program which means the Poverty Reduction Program through the provision of cash assistance to very poor families based on terms and conditions has been established. In the implementation of PKH in the Social Service Specifically in Sagulung District and illustrating the inhibiting factors for implementing PKH implementation. The results of this study indicate that the implementation is effective but has not run efficiently because the benefits have not been distributed evenly. Inappropriate data collection process has led to the discovery of assistance that has not been right on target in the community. Factors that hinder its implementation include, among others, KPM that are not committed to fulfilling their duties and obligations due to lack of awareness of the importance of health and Education for Beneficiary Families. And there are still lacking in re-examinations by policy organizers in the regarding data on the list of beneficiaries sent by the center whether those listed are in accordance with the specified criteria. However, for the long term, the PKH Program is expected to make significant changes to the lives of the poor towards better education and health.

Keywords: *Beneficiary Families; Implementation; Poverty; Policy.*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan yang di tegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin program keluarga harapan (PKH) yaitu program bantuan pemberian sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan miskin program penangananan fakir miskin, memiliki komponen, kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Di dalam penanggulangan kemiskinan itu untuk membiayai tiga program pengentasan kemiskinan, ada berbagai macam program ialah bantuan kartu Indonesia pintar, katu Indonesia

sehat dan Program keluarga harapan. Di dalam Implementasi Program penanggualangan kemiskinan maka saya mengambil salah satu dari menaggulangi kemiskinan di kota batam yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial

dan anomi masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya aspek materi dan rohani bagi kesejahteraan tidak independen satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat.

Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan

dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018.Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Tabel 1.1 Jumlah Persentase, dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Batam Maret 2014- Maret 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jumlah)	Persentase penduduk Miskin (Persentase)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2014	61,399	5.3	497,415
2015	59,940	5.08	525,452
2016	57,340	4,68	565,380
2017	61,161	4,81	591,589
2018	591,589	5.81	650,406
2019	66,210	4.85	659,170

(Sumber: Data diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit. Indeks Keparahannya (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai

gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk

Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit diatas, maka peneliti saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Peanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sagulung)".

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pendapat Thomas R. Dye (Anggara, 2014: 35) mengartikan kebijakan publik ialah suatu kebijakan dapat bermanfaat besar bagi warga dan tidak mempunyai efek kerugian, pemerintah harus lebih bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan, karena segala sesuatu baik dikerjakan pemerintah ataupun tidak dikerjakan menjadi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mempunyai manfaat yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan Anderson dalam (Tahir, 2015: 21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Namun pada hakikatnya, pengertian kebijakan tetap memiliki arti mengenai yang seharusnya dilakukan dari yang diutarakan kedalam tindakan mengenai masalah tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan diharapkan harus merangkum tahapan implementasi dan evaluasi agar kebijakan tidak hanya menekankan kepada yang diutarakan menjadi kurang memenuhi. Bullock et al (Anggara, 2014: 45) utuk dapat disebut suatu kebijakan, sebuah keputusan diperlukan mengikuti jalan menuju implementasi yang bertujuan untuk mencapai target. Oleh sebab itu, kebijakan memiliki konsep seperti dibawah:

- a) Ketetapan, ia mempunyai rancangan ketentuan tertentu yang mempunyai kuasa mengikat majlis dan pembuatnya.
- b) Maksud, artinya dalam kebijakan untuk mencapai tujuan ataupun target tertentu.
- c) Keputusan, untuk mengambil sebuah keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
- d) Sebuah proses implementasi dari hal yang telah diputuskan atau dipusatkan.

Ada beberapa tahapan yang dapat memecahkan suatu masalah untuk melaksanakan kebijakan William Dunn(Anggara, 2014: 120) ialah:

1. Penyusunan Agenda

Setiing Agenda adalah Tahapan dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini ada ruang untuk menerjemahkan isu dan prioritas Bersama kedalam agenda publik yang bersangkutan. Kalau sebuah isu yang lebih menonjol dan mempunyai masalah yang lebih penting, maka isu tersebut akan lebih diutamakan untuk diselesaikan permasalahannya.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah atau keluhan yang sudah diterima aktor dari aspirasi masyarakat dan juga masalah yang sudah banyak memerlukan perbaikan kan lebih diutamakan untuk penyelesaiannya dan aktor-aktor pembuat kebijakan akan memilih beberapa alternative lain untuk mengubah dan menyelesaikan masalah tersebut.

3. Adopsi/Legitimasi

Tujuannya adalah untuk menyetujui proses manajemen dasar. Ketika proses hukum dalam masyarakat ditentukan oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara mengikuti pedoman dari pemerintah. Namun, warga harus diyakinkan bahwa pemerintahan itu sah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dapat dilihat sebagai suatu yang berkegiatan fungsional. Yang dimaksud adalah bahwa evaluasi tidak hanya menilai dan dilaksanakan ditahap akhir melainkan dilakukan juga disekeluruhan proses kebijakannya. Maka dengan itu Evaluasi dapat meliputi tahapan perumusan masalahnya, program atau isu yang diusulkan, dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan, pelaksanaan, dan tahapan efek kebijakannya.

2.2 Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu di buat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak di laksanakan. Menurut Gordon Pasolong (Mulyadi, 2016: 24) Implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisasikan berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan feasibl. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah persiapan

implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Selanjutnya peneliti menggunakan temuan George C. Edward III (Anggara, 2014:251) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah:

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai fungsi dan peran yang lumayan perlu untuk membandingkan keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan yang dijalankan. Agustino (Anggara, 2014:251) mengungkapkan kebijakan yang di komunikasikan pun harus pasti, jelas, dan tidak berubah-ubah.

b. Sumber Daya

Sumber daya dibutuhkan untuk implementasi pendapat Edwards III (Anggara, 2014:252), antara lain adalah:

1. Staf/Pegawai, aktor atau orang - orang dipilih yang cukup untuk menjalankan sebuah implementai dan yang juga memiliki kemampuan.
2. Informasi, data yang diperoleh dari atasan dan dari masyarakat yang saling berkaitan untuk menjalankan sebuah kebijakan.
3. Kewenangan adalah implementor mempunyai kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan sebuah kebijakan.
4. Fasilitas.

Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung di perlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus di laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang di harapkan.

d. Struktur Birokrasi

Ia menekan perlu adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilaksanakan oleh Wimmy Haliim, dengan judul "Poverty Reduction for Extremely Poor Households of Malang City by the Implementation of Program Keluarga Harapan. *Jurnal Bina Raja*, 2016, 8 (2) : 331-340 ISSN 2503-3360. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif. Penelitian bertumpu pada akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang buruk di Kota Malang, yang berdampak pada masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dilaksanakan dengan baik dan jumlah prosedur serta penerima PKH RTSM menurun dari tahun ke tahun (Wimmy Haliim, 2016).
2. Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017) dengan judul penelitian implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui kartu penjamin sosial dan kartu Indonesia pintar pada masyarakat (Studi kasus di kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah dimana siswa kurang mampu mengikuti pertemuan sosialisasi program pemerintah penanggulangan kemiskinan dengan KIP usia 6-21 sedangkan proses memverifikasi datanya dibuat oleh masyarakat sendiri oleh KPS - dan nomor KIP sudah diserahkan menerima anggaran. Dengan menyerahkannya keperangkat Desa untuk KPS dan KIP secara langsung ke sekolah terkait. Apa yang Anda lakukan dengan pendistribusian kartu jika persyaratan yang diberikan terpenuhi dan kartu KIP dan KPS telah dipilih untuk didistribusikan secara

berkelanjutan? Hasil penelitian adalah investigasi lanjutan dan peninjauan kembali terhadap wilayah-wilayah yang dianggap layak oleh pemerintah. Berdasarkan pengelompokan paroki, hal ini telah dilakukan oleh aparat untuk memfasilitasi penyaluran bantuan termasuk kartu jaminan sosial dan kartu pintar Indonesia di Kota Malang, khususnya Kelurahan Kuaman, dengan 560 orang miskin, hanya 30% yang berhak mendapatkan kartu jaminan sosial. Saat mereka menggunakan kartu. Indonesia pintar sampai 5%. Ada baiknya jika ada kegiatan sosialisasi program-program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin (Sulhan & Sasongko, 2017).

3. Priska A. Matualage (2017) Dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting). Dengan *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuminting mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil sebagai berikut: a). Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. b). Salah satu faktor terpenting dari program PKH ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. (Matualage, 2017).
4. Clara Dheby, Abdul Kadir Adys, Muhammad Idris (2017) dengan Judul Penelitian implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan *Jurnal Administrasi Negara* Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian program keluarga harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Implementasi Program Keluarga

Harapan (PKH) Bidang Pendidikan dengan mengacu pada dua variabel yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan belum terimplementasikan dengan baik. Program-program yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak KPM Kecamatan Tamalate tidak dilaksanakan secara maksimal (Clara, 2017).

5. Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, (2018) Cakti Indra Gunawan. Dengan judul penelitian implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga harapan untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di dapatkan adalah Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH dapat terlaksana dengan:
a).Pembenahan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. b).Berperan aktifnya para peserta program dalam mensukseskan program ini, dimana program ini dijadikan program pemberdayaan masyarakat yang baik melalui kelompok usaha bersamanya. c).Terlibatnya para peserta program dalam sosialisasi hal – hal yang berguna dan baik kepada masyarakat sekitarnya, hal ini menjadikan para peserta PKH menjadi pendukung kegiatan–kegiatan pemerintah secara tidak sadar (Arif & Cahyo, 2018).
6. Antriya Eka Suwinta (2016) dengan judul penelitian implementasi program keluarga harapan (Pkh) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Kesimpulan Penelitian ialah implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian

tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH yang menyebabkan peserta PKH tidak menyadari pentingnya mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi kehidupan sehingga tujuan PKH dalam jangka pendek belum bisa (Eka Suwinta, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis ini dapat mengetahui dan menggabungkan konsep penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam. Untuk memudahkan penelitimendeskripsikan dan Mengimplementasikan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi pada program keluarga harapan di kecamatan sagulung) Penelitian menggunakan Fokus Penelitian menurut (Sugiyono, 2014: 209), yaitu:

1. Menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu organizing domain
2. menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk membangun iptek
3. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada.

Ada 2 (dua) sumber data yang di digunakan oleh penelitian dalam informasi menurut Spradley (Sugiyono, 2014: 215) yaitu:

- a) Data primer data secara langsung dari informan yang dipilih dan diamati untuk wawancara sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber yaitu Pejabat Dinas Sosial Dan

Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari , Masnelly Harahap, S.Pd Kepala Kasi Pemberdayaan Masyarakat, DianWiris pendamping program keluarga harapan, RikaOktavia pendamping program keluarga harapan, Buk Dindin Buk Nizam dan Buk Suhani Sebagai Penerima PKH.

- b) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat berupa, informasi mengenai program keluarga harapan, foto, gambar, website, dokumentasi dan laporan kinerja Dinas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam (Studi pada keluarga harapan di Kecamatan Sagulung).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kebijakan menanggulangi kemiskinan, penulis menggunakan variable yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan menurut Model George C. Edward III (Anggara, 2014:252) ialah:

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan penelitian ni peneliti menemukan komunikasi yang dilakukan Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan cara sosialisasi langsung kelapangan per tiga bulan, pendamping program keluarga harapan (PKH) bertemu dengan Rt/Rw untuk mengumpulkan dan memberitahu kepada masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan yang bermanfaat bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat dibagikan kepada masyarakat yang memang layak untuk menerima program tersebut. Petugas melakukan pengecekan sekolah apakah siswa yang menerima program Pendidikan menghadiri pembelajaran setiap harinya, petugas juga melakukan pengecekan kepada masyarakat yang menerima program kesehatan untuk posyandu anak secara langsung di fasilitas umum tempat dilaksanakannya program tersebut.

2. Sumber daya

Untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukana adanya sumberdaya yang sangat mendukung agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik, dalam implementasi kebijakan menanggulangi kemiskinan di Sagulung juga memerlukan adanya sumber daya yang cukup. Sumber daya yang diberdayakan untuk program keluarga harapan memberdayakan 14 orang yang terbagi atas Kelurahan Tembesi 2 orang, Kelurahan Sungai Pelenggut 3 orang, Kelurahan sungai Langkai 2 orang, Kelurahan Sungai Lekop 2 orang, Kelurahan Sagulung Kota 2 orang, kelurahan Sungai Binti 3 orang. selain itu anggaran yang di berikan berupa uang tunai per tiga bulan, dan beras perbulan Rp. 850.000 per tiga bulan dan beras sebanyak 20 Kg per bulannya.

3. Disposisi

Sikap dan penerapan yang dilaksanakan implementor sagat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Dikarenakan seorang implementor sangat berperan aktif dalam proses berjalannya sebuah kebijakan. Dalam penelitian iini mplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Batam, Dinas sosial mengadakan programa kerja dalam rangka untuk pemutahiran data per tiga bulan dan juga memverifikasi fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan per tiga bulan. Penerapan program kerja ini dilakukan Dinas sosial agar mencapai target yang diinginkan.

4. Struktur birokrasi

Untuk implementasi kebijakan yang mempengaruhi sebuah kebijakan itu adalah kejelasan dari pembuat sampai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi yang jelas dan transparan akan membawa sebuah kebijakan tersebut kearah yang lebih baik dan berjalan dengan lancar. Dalam penelitian dapat diketahui bahwa awal mula pembentukan PKH ini dimulai dari KEMENSOS, kemudian DINSOS, dari

DINSOS ke Pendamping PKH, dari pendamping ini disalurkan ke Kecamatan, kemudian dari Kecamatan diserahkan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan lagi ke RT/RW masing-masing, lalu RT/RW menyampaikan lewat undangan kepada masyarakat terkait program PKH ini. Setelah undangan ini diterima oleh KPM diadakanlah validasi awal ataupun pertemuan awal yang dihadiri oleh pihak dari Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Fasdik dan Faskes dalam kesempatan ini diadakan sosialisasi dan dari hasil sosialisasi ini diperoleh data jumlah masyarakat yang layak mendapat PKH ini. Kemudian setelah diperoleh data, data ini dimasukkan melalui operator oleh Korkota (Kordinator Kota), dari Korkota kemudian disampaikan ke Korwil (Kordinator Wilayah), setelah data terkumpul lalu data ini diserahkan kembali ke KEMENSOS (Kementerian Sosial). Kemudian KEMENSOS membagikan hasil akhir yakni KPM yang layak mendapat bantuan. Setelah data ini disampaikan oleh KEMENSOS maka pendamping PKH masing-masing mengadakan pertemuan kelompok dan melakukan pemutahiran data setelah pemutahiran ini terbentuklah FDS (Family Development Session) atau Program Keluarga Harapan dan telah lepas dari BANSOS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas sosial peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik melalui sosialisasi langsung kelapangan, pendamping PKH memberitahu kepada Rt/Rw akan adanya program keluarga harapan. Kemudian Rt/Rw setempat mengumpulkan masyarakat di fasilitas umum (fasum) warga dengan memberikan undangan kepada warga, pendamping PKH memberitahu

masyarakat bahwa program keluarga harapan akan diberikan kepada masyarakat yang layak menerima program tersebut, per tiga bulan mereka mengadakan kunjungan ke fasilitas umum untuk memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan program keluarga harapan dengan benar. Namun sejauh ini masih ada masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan) yang masih belum mengetahui alasan sudah terdaftar 2 tahun namun belum juga mendapatkan bantuan program keluarga harapan dan masih kurangnya pengecekan ulang tentang masyarakat yang terdaftar yang sudah menerima bantuan dan yang belum menerima program keluarga harapan.

2. Dari penelitian yang dilaksanakan peneliti di Dinas sosial dapat disimpulkan bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam (studi pada keluarga harapan di Kecamatan Sagulung) sudah cukup baik, Dinas sosial memberdayakan 14 orang di Kecamatan Sagulung, yang dibagi berdasarkan kelurahan-kelurahan, Kelurahan Tembesi 2 orang, Kelurahan Sei lekop 2 orang, Kelurahan Sungai langkai 2 orang, Kelurahan Sagulung Kota 2 orang, Kelurahan Sungai Binti 3 orang, Kelurahan Sei Pelengut 3 orang. Anggaran dalam implementasi kebijakan ini diberikan kepada masyarakat pertiga bulan sebesar Rp. 850.000 dan 20 kg beras yang didapatkan masyarakat yang mendapatkan kartu keluarga harapan. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang mengatakan keluhan dari informan bahwa dia sudah terdaftar selama 2 tahun sebagai keluarga penerima harapan (KPM) tetapi belum juga mendapatkan bantuan program seperti yang dikatakan dinas sosial sebelumnya.
3. Dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas sosial dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam disposisi atau sikap yang dilakukan petugas

ataupun pendamping PKH sudah dikatakan cukup baik dapat dilihat melalui penerapan program kerja pertiga bulan untuk mencapai target dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam. Petugas pertiga bulan melakukan kunjungan ke fasum (faslitas umum) bertemu Rt/Rw dan mengumpulkan masyarakat untuk memberi bantuan dan melakukan survey ke sekolah untuk memastikan anak sekolah yang menerima program kesehatan menghadiri kelas dan memastikan bahwa program tersebut ditujukan pada orang-orang yang benar. Namun belum ada keluhan yang ditanggapi dari Dinas sosial dan pendamping PKH terkait masyarakat yang belum mendapatkan program Keluarga Harapan, terlihat dari infoman masih ada yang masih belum mendapatkan bantuan program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Dari penelitian yang dilaksanakan peneliti di Dinas sosial dapat disimpulkan untuk struktur Birokrasi yang mereka lakukan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di KotaBatam (studi pada keluarga harapan di Kecamatan Sagulung) sudah dikatakan dapat terlaksana dengan baik dapat dilihat dari banyaknya instansi yang turut berpartisipasi dan bertanggung jawab dari awal pembuatan program keluarga harapan (PKH) sampai pada keluarga penerima manfaat (KPM) masyarakat yang benar-benar layak mendapat program tersebut akan diberikan melalui Dinas sosial kepada Kelurahan, kelurahan kepada Rt/Rw, dan Rt/Rw kepada masyarakat yang datanya sudah dikumpulkan dan sudah dikatakan layak untuk menerima program keluarga harapan tersebut. Namun bukan berarti begitu banyaknya instansi yang ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan program ini, masih ada masyarakat yang sudah terdaftar selama 2 tahun sebagai keluarga penerima manfaat belum

mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dikarenakan tidak adanya pengecekan dari Dinas sosial terkait masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari program tersebut dan informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat belum jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dheby, C., Adys, A. K., Idris, M., Studi, P., Administrasi, I., Unismuh, N. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3.
- Hendi. (2014). Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Bidang Pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 214–231. <https://doi.org/ISSN: 2088-527x>
- Kasriyati.S.Pd. (2012). Kemiskinan dan Penyebabnya di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–10.
- Lidiana, MohdNur Stechalad, M. N. (2014). Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Muara Tiga. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 31–38.
- Purwanto, E. A. (2008). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324. <https://doi.org/10.22146/jsp.11009>
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community (Study i), 16(2).
- Rafiudin, M. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*.

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawan j. Luthfi. (2016). *Hukum Kebijakan Publik* (2016th ed.). Malang, Jatim: Setara Press
- Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (2nd ed.). Bandung: alfabeta,cv.
- Sofyandi. (2013). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Batu Aji), 27.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alfabeta, cv.
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang), 6(1), 15–18.
- Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Indonesia Pintar Pada Masyarakat
- Tahir, Arifin. (2015). *kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan daerah*. alfabeta,cv.